

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Perkembangan pembangunan yang semakin hari semakin berkembang dengan cepat telah membuka kesempatan bagi perempuan yang ingin berperan aktif disektor publik atau di dunia kerja. Sejak terbentuknya kebijakan pemerintah yang dikenal dengan kebijakan peran ganda perempuan, saat ini perempuan di Indonesia sudah mulai terlihat dengan jelas diberbagai bidang pekerjaan. Daulay (2015:280) mengemukakan bahwa perempuan harus mendapatkan izin dan ridha dari suami untuk meninggalkan domestiknya ke publik. Perempuan juga mempertimbangkan kembali akan pengasuhan anak-anaknya apabila dirinya yang berstatus sebagai ibu juga sebagai perempuan bekerja diluar rumah. Inilah yang kemudian memunculkan fenomena rasa dilema bagi perempuan untuk tetap bekerja dengan berbagai alasan yang mendasarinya ataukah hanya ruang domestik untuk menjadi ibu rumah tangga dan saat berada ruang publik untuk bekerja. Seperti yang dikemukakan Endah Suslantini (2006:103).

Pada awalnya, perjuangan menuju persamaan peran laki-laki dan perempuan masih terbentur belenggu sistem nilai sosiokultural, di daerah yang memiliki ikatan nilai tradisi patriarkis yang kuat seperti Jawa, aktivitas perempuan secara tradisional terpusat pada sektor domestik. Posisi perempuan dalam suatu keluarga seringkali dianggap sebagai *konco wingking* atau hanya sebagai orang yang kedudukannya lebih rendah dibanding laki-laki dan

bertugas untuk mengurus urusan keluarga. Dalam pandangan Stoler (moore, 1998) perempuan yang bekerja dirana publik berlandaskan pada motivasi yang beragam. Pada kali pertama bekerja, alasan utama adalah untuk kepentingan ekonomi rumah tangga. Namun berikutnya ternyata mereka berpendapat bahwa dengan bekerja kemandirian mereka dapat terasah. Perempuan bekerja juga belajar untuk menghadapi tantangan, baik sosial, ekonomi maupun budaya.

Dibeberapa tempat ditemui kenyataan bahwa dengan adanya perempuan yang bekerja maka muncul akibat negatif. Perempuan bekerja karena dorongan untuk menegakkan ekonomi rumah tangganya atau mempertahankan asap dapurnya. Bagi perempuan yang bekerja diluar rumah, jelas waktu yang digunakan akan terbagi. Sebagai akibatnya frekuensi bertemunya dengan anggota keluarga sangat terbatas, baik dengan suami maupun anak-anaknya. Meskipun secara teoritis yang terpenting adalah kualitas bukan kuantitas, akibatnya jika terjadi suatu ketidakharmonisan dalam keluarga seperti seringnya bertengkar, perceraian, maupun anak-anaknya bermasalah maka yang dituding sebagai sumber kesalahan oleh masyarakat adalah karena istri atau ibu jarang dirumah (Bainar, 1998).

Kondisi demikian juga sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh Komnas Perempuan yang kemudian membentuk sebuah program yang melindungi hak-hak para wanita yaitu PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga).

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dalam kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan di Indonesia, kepala

keluarga adalah suami atau laki-laki. Selain itu, nilai social budaya umumnya juga masih menempatkan perempuan dalam posisi sub-ordinat. Oleh karena itu keberadaan perempuan sebagai kepala keluarga tidak sepenuhnya diakui baik dalam sistem hukum yang berlaku maupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai akibatnya perempuan kepala keluarga menghadapi diskriminasi hak dalam kehidupan sosial politiknya (PEKKA, 2010).

Rumah tangga yang dikepalai perempuan umumnya miskin dan merupakan kelompok termiskin dalam strata sosial ekonomi di Indonesia. Hal ini sangat terkait dengan kualitas sumberdaya perempuan kepala keluarga (Pekka) yang rendah. Sebagian wanita mengalami trauma karena tindak kekerasan dalam rumah termasuk pembatasan hak-hak wanita dalam kegiatan ekonominya. Terlepas dari semua kondisi kehidupan wanita yang memprihatinkan, wanita khususnya yang hidup di negara berkembang sebenarnya memiliki peran tersendiri sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Berdasarkan beberapa bukti empiris, tingkat pengembalian (*rate of return*) dari investasi pendidikan kaum wanita lebih tinggi dibanding dengan tingkat pengembalian dari investasi pendidikan kaum pria. Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita dapat memberikan produktivitas kerja yang lebih tinggi dibanding kaum pria. Bahkan dengan pendidikan wanita yang lebih tinggi, untuk jangka panjang wanita tersebut dapat menjamin kualitas intelegensi anak – anaknya sehingga berguna untuk masa depan, dapat mengurangi tingkat fertilitas karena pada umumnya

wanita yang bekerja menunda untuk menikah muda sehingga momentum ledakan penduduk dapat dikurangi. Apalagi jika dilengkapi dengan efektifnya program-program pengentasan kemiskinan dari pemerintah melalui ibu-ibu PKK dan program-program simpan pinjam khusus untuk wanita.

Dalam dunia kerja, saat ini semakin banyak wanita yang berpartisipasi dalam dunia kerja (ekonomi). Akan tetapi, trend ini hanya umum dijumpai di kota-kota besar saja, sedangkan untuk di daerah perkotaan, seperti di Kecamatan Kota kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara misalnya, partisipasi kerja masih didominasi oleh kaum pria, apalagi jika melihat jumlah jam kerja dalam sehari. Apabila dilihat ke sisi jam kerja perhari, maka masih kaum pria yang memiliki jam kerja yang lebih banyak dibanding kaum wanita.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proporsi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal dengan istilah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK biasaya mengikuti pola huruf "U" terbalik. Angka ini rendah pada umur-umur muda (karena sekolah), kemudian naik Keputusan wanita atau istri untuk bekerja membawa konsekuensi dan tanggung jawab rangkap sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pekerja khususnya menyangkut pembagian waktu untuk melakukan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan mencari nafkah, disamping itu berapa pendapatan yang diperoleh dan dipergunakan untuk

menunjang ekonomi rumah tangga adalah masalah yang melatar belakangi penelitian ini.

Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan untuk mencari nafkah bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga. Pekerjaan yang dilakukannya berdasarkan pada tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dan juga ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini beberapa wanita yang memiliki taraf pendidikan dan keterampilan yang rendah cenderung memilih untuk melakukan pekerjaan kasar (menuntut kekuatan fisik dan berat), salah satunya pekerjaan proyek di lapangan yang mana meliputi tukang dan buruh bangunan. Faktanya pekerja bangunan wanita mayoritas dilakukan oleh kalangan masyarakat kelas bawah, dimana yang menjadi latar belakang memilih pekerjaan tersebut adalah faktor ekonomi.

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Melati, Zaika, & Budio (2011) menjelaskan bahwa perempuan yang bekerja menjadi tukang bangunan tidak hanya menyelesaikan pekerjaan diproyek bangunan tetapi juga menyelesaikan pekerjaan rumah, mereka mengungkapkan bahwa konflik peran ganda cukup berat untuk dilakukan. Konflik peran ganda yang dialami meliputi peran sebagai istri yang membantu suami menjadi tulang punggung keluarga dan juga sebagai seorang ibu. Kecenderungan wanita yang bekerja sebagai buruh bangunan dapat menimbulkan dampak berupa: merenggangnya ikatan keluarga yang di sebabkan terbatasnya waktu untuk keluarga, meningkatnya kenakalan remaja dan lain-lain. Aryatmi (dalam Daeng, Hartati, & Widyastuti, 2012) memaparkan bahwa pilihan wanita untuk bekerja

dilandasi oleh motif kerja sebagai berikut: (a) keharusan ekonomi, (b) keinginan untuk membina karir dan (c) kesadaran bahwa pembangunan memerlukan tenaga kerja, baik tenaga kerja pria maupun wanita.

Dapat diketahui bahwa kabupaten Timor Tengah Utara memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang cukup memadai khususnya perempuan berperan aktif dalam melakukan pekerjaan sehari – hari untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang di ukur melalui sisi pendapatan perempuan melalui UMR yang di tetapkan oleh Surat keputusan pemerintah setempat.

Untuk mempermudah pembaca maka di tampilkan data –data mengenai pendapatan yang di tetapkan oleh pemerintah melalui standar UMR yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pendapatan Ibu Rumah Tangga berdasarkan Upah Minimum Regional di Kabupaten TTU

Tahun	Pendapatan Ibu Rumah Tangga
2000	Rp. 184.000
2001	Rp. 275.000
2002	Rp. 330.000
2003	Rp. 350.000
2004	Rp. 450.000
2005	Rp. 550.000
2006	Rp. 600.000
2007	Rp. 650.000
2008	Rp. 700.000
2009	Rp. 725.000
2010	Rp. 800.000
2011	Rp. 850.000
2012	Rp.925.000
2013	Rp. 1.010.000
2014	Rp. 1.125.000
2015	Rp. 1.425. 000

2016	Rp. 1.525.000
2017	Rp. 1.660.000
2018	Rp.1.795.000
2019	Rp. 1.950.000
2020	Rp. 2.010.000

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 2020

Pada tabel 1.1 menerangkan bahwa pendapatan di kabupaten timor tengah utara tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.010.000 sedangkan pendapatan di kabupaten Timor Tengah Utara terendah terjadi pada tahun 2000 sebesar Rp. 184.000. dapat dilihat bahwa pendapatan perempuan di kabupaten Timor Tengah Utara dari tahun 2000 sampai 2020 mengalami peningkatan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan wanita di kabupaten Timor Tengah Utara karena bekerja sebagai ibu rumah tangga adalah sebuah pilihan yang tidak selalu karena kekurangan pendapatan, tetapi pada rumah tangga miskin adalah sebuah keharusan bagi istri pada rumah tangga miskin yang dituntut agar dapat berperan ganda dalam rumah tangganya dengan mengalokasikan waktu sehingga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti umur, tingkat pendidikan, jam kerja, sifat pekerjaan dan jumlah tanggungan terhadap pendapatan perempuan (Sudarmini, 2006).

Tabel 1.2
Alokasi jam kerja ibu rumah tangga berdasarkan jenis kelamin perempuan di Kabupaten TTU

Tahun	Presentase Jam Kerja Ibu Rumah Tangga
2000	4,121
2001	6,276
2002	5,048
2003	7,329
2004	8,542
2005	3,452

2006	5,621
2007	3,868
2008	7,726
2009	3,951
2010	6,237
2011	4,565
2012	4,968
2013	7,629
2014	4,371
2015	5,216
2016	6,467
2017	4,652
2018	5,821
2019	8,012
2020	9,132

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 2020

Berdasarkan pada tabel 1.2. menunjukkan bahwa presentase jam kerja di kabupaten Timor Tengah Utara tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 9,132 sedangkan presentase jam kerja di kabupaten Timor Tengah Utara terendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 3,452. Hal ini menunjukkan bahwa presentase jam kerja di kabupaten Timor Tengah Utara mengalami perubahan pada setiap tahun.

Alokasi jam kerja pada umumnya mempengaruhi tingkat pendapatan khususnya bagi para wanita itu sendiri. Secara umum, makin tinggi jam kerja maka makin tinggi pula pendapatan yang diterima, misalnya seorang pegawai negeri atau swasta yang memilih untuk lembur maka orang tersebut akan mendapatkan upah lembur atau bonus yang lebih banyak. Alokasi jam kerja ini memiliki hubungan erat dengan lingkup pengangguran (Rosmiyati Hodijah Saleh, 1993).

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Perempuan Rumah Tangga yang
ditamatkan Di Kabupaten TTU

Tahun	Tingkat Pendidikan Perempuan rumah tangga			
	SD	SMP	SMA/SMK	Perguruan Tinggi (PT)
2000	10,23	4,30	4,33	3,71
2001	13,49	6,58	6,18	5,68
2002	12,78	3,52	4,12	2,72
2003	15,91	8,82	6,50	4,39
2004	14,53	8,29	3,13	6,49
2005	17,49	7,46	7,82	3,22
2006	16,52	5,80	6,25	5,24
2007	19,29	6,24	4,83	3,55
2008	18,75	8,55	8,29	4,58
2009	21,63	6,78	5,78	3,65
2010	24,65	7,30	5,99	4,17
2011	22,68	6,58	6,78	3,13
2012	23,24	5,52	6,95	4,12
2013	21,13	6,82	5,87	6,79
2014	20,93	8,29	6,13	5,49
2015	18,59	7,46	7,82	5,22
2016	21,42	6,80	6,85	5,95
2017	19,17	7,24	8,53	6,75
2018	21,34	8,95	5,96	4,18
2019	20,32	6,58	6,78	5,65
2020	22,62	9,12	7,16	5,72

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara 2020

Berdasarkan pada tabel 1.3 dapat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan perempuan di kabupaten timor tengah utara mulai dari tingkat pendidikan SD tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 23,24 sedangkan tingkat pendidikan SD terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 18,59 dan tingkat pendidikan SMP tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 8,95 sedangkan tingkat pendidikan SMP terendah terjadi pada tahun 2012 sebesar 5,52 dan untuk tingkat pendidikan SMA/SMK tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 8,53 sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK terendah terjadi pada tahun 2004 sebesar 3,13 dan tingkat

pendidikan Perguruan Tinggi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 6,79 sedangkan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi terendah terjadi pada tahun 2002 sebesar 2,72.

Menurut Mahmud dalam Wahyu (2011), status sosial ekonomi antara lain meliputi tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, jenis pekerjaan, jembatan, orang tua, fasilitas kusus dan barang-barang berharga yang ada dirumah. pekerjaan adalah akibat dari pendidikan dan merupakan salah satu faktor penentu. Pendidikan seseorang sangat memengaruhi perilaku konsumsi. semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhi

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang **“Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin di Ukur Dari Sisi Pendapatan di Kabupaten Timor Tengah Utara”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari ulasan latar belakang dibahas dalam penelitian ini adalah dengan segala keterbatasan yang ada, wanita tetap memiliki potensi untuk menambah pendapatan keluarga melalui pendapatan wanita itu sendiri, sehingga dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) berpengaruh terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y)?
2. Apakah Alokasi Jam Kerja Ibu Rumah Tangga (X_2) berpengaruh terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y)?

3. Apakah Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) berpengaruh terhadap alokasi jam kerja Ibu Rumah Tangga (X_2)?
4. Apakah Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) Alokasi Jam Kerja Ibu Rumah Tangga (X_2) berpengaruh terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pengaruh Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y) ?
2. Untuk Mengetahui pengaruh Alokasi Jam Kerja Ibu Rumah Tangga (X_2) terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y)?
3. Apakah Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) berpengaruh terhadap alokasi jam kerja Ibu Rumah Tangga (X_2)?
4. Untuk Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Ibu Rumah Tangga (X_1) Alokasi Jam Kerja Ibu Rumah Tangga (X_2) terhadap Pendapatan Ibu Rumah Tangga (Y)?

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat yang memberikan sumbangan pemikiran sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan tingkat pendidikan Ibu Rumah Tangga dan lokasi jam kerja Ibu Rumah Tangga terhadap pendapatan Ibu Rumah Tangga.

2. Manfaat praktis

Usaha untuk memberikan tindakan berupa pemahaman yang tepat kepada masyarakat, pemerintah maupun perusahaan tentang pentingnya peran dan tanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaannya. Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang Peranan wanita dalam menunjang ekonomi keluarga miskin diukur dari sisi pendapatan di Kabupaten Timor Tengah Utara.

2. Bagi Pembaca Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.